

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 08 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERATURAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012

LINGKUP URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DIDEKONSENTRASIKAN TAHUN 2012 BERDASARKAN
 PENGELOMPOKAN KELUARAN

Kegiatan dekonsentrasi lingkungan hidup tahun 2012 diatur dalam nomenklatur perencanaan sebagai berikut:

- a. Nama Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 b. Kode Program : 013
 c. Nama Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
 d. Kode Kegiatan : 2722
 e. Keluaran : (01) Peningkatan Pencemaran Lingkungan
 (02) Pengendalian Kersakan Lingkungan
 (03) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

No	MENURUT PP 38/2007		MENURUT KELOMPOK KELUARAN	
	Sub sub Bidang	Urusan	Payang Keluaran (Output)	Sub Keluaran (Sub Output)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Perencanaan pelaksanaan pengelolaan limbah B3	Pengendalian pencemaran lingkungan	Perencanaan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER

MENURUT PP 38/2007		MENURUT KELOMPOK KELUARAN		
No.	Sub sub Bidang (1)	Urusan (3)	Paying Keuaran (Output) (4)	Sub Keuaran (Sub-Output) (5)
2	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilongkapi AMDAL yang menjadi urusan wajib Pemerintah	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LIT	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah kabupaten/kota (pemantauan terhadap RKL-IRL, pengawasan Komisi Penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)
3	Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Kondikasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air skala nasional dan/atau merupakan lintas batas daerah	Pengendalian pencemaran lingkungan	Pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara
4	Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara	Pengawasan dan pelaksanaan pemantauan udara skala nasional	Pengendalian pencemaran lingkungan	kegiatan pemantauan udara
5	Pengelolaan, pemantauan dan/atau pemisahan limbah	Pengawasan terhadap kegiatan pemantauan udara skala nasional	Pengendalian pencemaran lingkungan	Pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional
6	Pengelolaan, pemantauan dan/atau pemisahan limbah	Pengawasan terhadap kegiatan pemantauan udara skala nasional	Pengendalian pencemaran lingkungan	Pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional
7	Pengelolaan, pemantauan dan/atau pemisahan limbah	Pengawasan terhadap kegiatan pemantauan udara skala nasional	Pengendalian pencemaran lingkungan	Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan laut

MENURUT PP 38/2007		MENURUT KELOMPOK KEBERAN	
No.	Sub sub Bidang (2)	Urusan (3)	Payung Keberan (Output) (4)
6	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan	Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional	Pengendalian kerusakan lingkungan
7	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa	Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional	Pengendalian kerusakan lingkungan
8	Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan ekonomi daerah bidang lingkungan	Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup	<p>Perubahan aturan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau (MIH)</p> <p>Pemertanian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayar DAK Dilatig LJI</p> <p>Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah melalui 3R</p> <p>Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>Pembinaan pengawasan pelaksanaan Adwiyata</p>

MEMORANDUM NO. 38/2007		MENDIRI KELOMPOK KELUARAN	
No.	Sub sub Bidang	Urusan	Payung Keluaran (Output)
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Pengaturan hukum lingkungan	Penerapan hukum lingkungan	<p>Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LLI</p> <p>Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LLI</p> <p>Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LLI</p>
10	Perubahan iklim dan perlindungan atmosfer	<p>Penetapan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim</p> <p>Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan deposisi asam serta pemanfaatannya</p>	<p>Inventarisasi dan klarifikasi skala LLI yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau LLI sebagai hak milik publik/negara</p> <p>Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus LLI (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p> <p>Inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan LLI</p> <p>Inventarisasi upaya lokal dalam menghadapi perubahan iklim untuk mendukung pelaksanaan PROKLIM</p> <p>Identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)</p> <p>Pengembangan inventarisasi data gas rumah kaca (GRK)</p>

MENURUT PP 38/2007				MENURUT KELOMPOK KEJILARAN	
No.	Sub sub Bidang	Urusan	Payung Kebaruan (Output)	Sub Keluaran (Sub Output)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
11	Kelembagaan hayati	Pemertanian dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala nasional	Pengendalian kerusakan lingkungan	Inventarisasi data dan informasi keanekaragaman hayati	
				v	Disain Pengembangan Taman Kebun

KETERANGAN:

Kolom (5) yang berjudul Sub Keluaran (Sub Output) adalah misal lalapan/bagian dari urusan yang berada di kolom (3) yang diringkas ke pada Gubernur. Tahapan/bagian lain yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan urusan di kolom (3) yang tidak tercantum dalam kolom (5) masih dilaksanakan oleh Menteri.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALASAR KAMELAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 08 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PENYELINGKHAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012

ALOKASI ANGGARAN DAN INDIKATOR KINERJA
 DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
1	NAD (Nanggroe Aceh Darussalam)	<p>A. Penguatalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1. Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>2. Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>B. Penguatalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1. Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>2. Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>3. Laporan pengembangan inwentarisasi gas rumah kaca</p>	4.131.180.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
2	Sumatera Utara	<p>C Peningkatan Kapasitas PSUA dan LH:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pertanggung jawaban dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pertanggung jawaban terhadap RKL / RPL, pengawasan komisi penilai Amdal dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan kualifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH <p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 3 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perairan yang menjadi prioritas nasional 4 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan perubahan tujuan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 2 Laporan kegiatan penyalaman danau 3 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 	3.630.090.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>C Peningkatan Kapasitas PSIA dan LI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemanfaatan terhadap IKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klasifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik forum tertentu) 3 Laporan inventarisasi dan klasifikasi dugaan tindak pidana delik forum maupun delik material/ akibat pemanfaatan dan/atau kemiskinan lingkungan hidup 4 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LI 	3.927.544.000
3	Sumatera Barat	<p>A Penguatiran Pencemaran Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengendalian limbah D3, pengendalian kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional <p>B Penguatiran Kerusakan Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan inventarisasi data dan informasi KEMATI 2 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 3 Laporan kegiatan penyelesaian danaan <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemanfaatan terhadap IKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal dan evaluasi mutu dokumen) 	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
2		Laporan inventarisasi dan klasifikasi senketa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai baik milik publik dan/atau lingkungan hidup sebagai baik milik publik/negara	
3		Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
4		Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan MDW/YATA	
4	Riau	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah D3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p> <p>2 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LII:</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap TKK, RPL, pengawasan komisi penilai Audit, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klasifikasi senketa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai baik milik publik dan/atau lingkungan hidup sebagai baik milik publik/negara</p>	4.608.549.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
3	Kepulauan Riau	<p>3 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LII</p> <p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau luas belah negara</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pelaksanaan percepatan kerusakan lingkungan laut</p> <p>C Peningkatan Kapasitas TSDA dan LII</p> <p>1 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LII</p>	1.451.100.000
6	Kepulauan Bangka Belitung	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau luas belah negara</p> <p>3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan desain pengembangan taman BERTANI</p>	3.575.725.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>2 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>C Peningkatan Kapasitas PSIDA dan LH :</p> <p>1 Laporan penulisan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (penelitian terhadap EKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klaimisasi dengan tidak pidana delik formil maupun delik materil akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>3 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ALIHWATA</p> <p>4 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayar DAK Bidang LH</p>	3.801.388.000
7	Jambi	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah D3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersisi strategis nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>2 Laporan kegiatan penyelamatan danau</p> <p>3 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Kelurahan Indikator Kinerja/ Sub Kecamatan Indikator Kinerja/ Sub Desa	Alokasi Anggaran (Rp)
8	Sumatera Selatan	<p>C. Peningkatan Kapasitas PSTD dan LIT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pembinaan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Andal, dan evaluasi mutu dokumen) 2. Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formal kerumit) 3. Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dihayai TIAG Bidang LI 	3.573.520.000
		A. Penguatan Penguatan Lingkungan	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROTEK 2. Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 3. Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersuara strategis nasional 	
		B. Penguatan Kemasyarakatan Lingkungan	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan pengetahuan dan 	
		C. Peningkatan Kapasitas PSTD dan LIT:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pembinaan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Andal, dan evaluasi mutu dokumen) 2. Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formal tertentu) 	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
9	Bengkulu	<p>3 Laporan inventarisasi dan klasifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>4 Laporan peningkatan kapasitas SMDA Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>5 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayai DAK Bidang LH</p> <p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program IKOTER</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau luas basis negara</p> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>3 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH:</p> <p>1 Laporan penulisan dan pengawasan pelaksanaan esai dan dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKI /RPN, pengawasan temasi pemali Amdal, dan evaluasi unit dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klasifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p>	3.837.155.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
10	Lampung	<p>3. Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai baik milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai baik milik publik/negara</p> <p>4. Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formal maupun delik material) akibat pelanggaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>5. Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayar DAMK Bidang LH</p> <p>A. Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1. Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah D3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPIER</p> <p>2. Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional</p> <p>3. Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>B. Pengendalian Kemiskinan Lingkungan:</p> <p>1. Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Memayu Indonesia Hijau</p> <p>C. Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH:</p> <p>1. Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terpaday RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Audit, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2. Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formal tertentu)</p>	3.771.880.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
3		Laporan inventarisasi dan klasifikasi senyawa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik pribadi dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara	
4		Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayar DAK Bidang III	
5		Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan AMWYATA	
11	Banten	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>4 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R</p> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>2 Laporan pelaksanaan percepatan kerusakan lingkungan laut</p> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LII:</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah pemukiman terdampak RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Andel, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan peningkatan kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p>	4.374.373.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
3	Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayai DAK Bidang LI		
12	Jawa Barat	<p data-bbox="430 609 454 1081">3 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayai DAK Bidang LI</p> <p data-bbox="462 609 487 1081">A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p data-bbox="495 609 519 1081">1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah T3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p data-bbox="527 609 552 1081">2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersiar strategis nasional</p> <p data-bbox="560 609 584 1081">3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/suas hluas luas negara</p> <p data-bbox="592 609 617 1081">B Pengendalian Kersakan Lingkungan:</p> <p data-bbox="625 609 649 1081">1 Laporan perubahan timpan vegetasi dalam rangka program Memaju Indonesia Hijau</p> <p data-bbox="657 609 682 1081">2 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p data-bbox="690 609 714 1081">3 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p data-bbox="722 609 747 1081">4 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM</p> <p data-bbox="755 609 779 1081">C Peningkatan Kapasitas TSLA dan LI:</p> <p data-bbox="787 609 812 1081">1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p data-bbox="820 609 844 1081">2 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayai DAK Bidang LI</p> <p data-bbox="852 609 876 1081">3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran deldk formal tertentu)</p>	4.391.175.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
13	Jawa Tengah	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 2 Laporan kegiatan penyalaman danau 3 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 4 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca <p>C Peningkatan Kapasitas PSMD dan LH:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap MCL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klasifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu) 3 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH 	3.533.150.000
14	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:	3.582.156.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
1		Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah D3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER	
2		Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional	
3		Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara	
B		Peningkatan Kualitas Lingkungan:	
1		Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau	
2		Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut	
3		Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca	
C		Peningkatan Kapasitas (PSDA dan LIT):	
1		Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pembinaan terhadap RKI, /RPP, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)	
2		Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formal tertentu)	
3		Laporan inventarisasi dan klarifikasi sepektu lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara	
4		Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana delik formal maupun delik material akibat pemantauan dan/atau pemantauan lingkungan hidup	
5		Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADWYATA	
6		Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAM Bidang LH	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
15	Jawa Timur	<p>A Peningkatan Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah D3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPIER</p> <p>2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melwati perkotaan yang menjadi prioritas nasional</p> <p>B Peningkatan Kesehatan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LII</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah pemukiman terdapat RSL, RPPL, pengawasan komisi penilai AMDAL, dan evaluasi mutu dokumen</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klasifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup khususnya pelanggaran delik formal kerumuh</p> <p>3 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LI</p>	3.198.833.000
16	Bali	<p>A Peningkatan Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah D3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPIER</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p>	3.630.000.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R</p> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Meruju Indonesia Hijau</p> <p>2 Laporan kegiatan penyelamatan danau</p> <p>3 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan III:</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi, penaku Amdal, dan evaluasi mutu dokumery)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran debit formil reremny)</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>4 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LI</p>	3 875.129 000
17	Kusadenggara Barat	<p>A Penguatan Pemukiman Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PKOPK</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersisi strategi nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p>	3 875.129 000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
B	Peningkatan Kesuksesan Lingkungan:	1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau	
2	Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca	C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LLE	
1	Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemerintahan terhadap EKL /EIL, pengawasan komisi penilai Amdal dan evaluasi mutu dokumen)	2 Laporan inventarisasi dan klasifikasi pengujian kasus kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)	
2	Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayai DAK Bidang L1	3 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayai DAK Bidang L1	3 957 131.000
18	Nusa Tenggara Timur	A Peningkatan Kesuksesan Lingkungan:	
1	Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat ultra legis nasional	2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara	
2	Laporan pemantauan kualitas air minum	3 Peningkatan Kesuksesan Lingkungan:	
1	Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau	2 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca	
2	Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayai DAK Bidang L1	C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LLE	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
19	Kahuripan Selatan	<p>1. Laporan peninjauan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2. Laporan inventarisasi dan klarifikasi sumber lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>3. Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tidak patuh (delik fornal maupun delik material) akibat pemantauan dan/atau pemukiman lingkungan hidup</p> <p>4. Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang L11</p> <p>A. Pengendalian Pemukiman lingkungan:</p> <p>1. Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah D3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPIK</p> <p>2. Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional</p> <p>3. Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>4. Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>B. Pengerukan Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1. Laporan perubahan hilupan vegetasi dalam rangka program Memori Indonesia Hijau</p> <p>2. Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>3. Laporan identifikasi aksi mitigasi musadif lokal untuk mendukung penyusunan RAD</p> <p>C. Peningkatan Kapasitas PSPDA dan LH:</p>	4.950.718.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
20	Kalimantan Barat	<p>1 Laporan peninjauan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL/RPL, pengawasan komisi penilai Andal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADWYATA</p> <p>3 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LIJ</p> <p>A Peningkatan Perencanaan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengeloban limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program FKOTER</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang berskala strategis nasional</p> <p>3 Laporan kemitraan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>2 Laporan pelaksanaan penvegetasian kerusakan lingkungan laut</p> <p>3 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>4 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LIJ:</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL / RPL, pengawasan komisi penilai Andal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran dekh formal terentu)</p>	3.936.770.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		3 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LII	
		4 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADWYATA	
21	Kalimantan Timur	<p>A. Peningkatan Pencemaran Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melwati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau luas lintas negara <p>B. Peningkatan Kerusakan Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 2 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca <p>C. Peningkatan Kapasitas PSDA dan LII:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah perantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen 2 Laporan insentivisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup khususnya pelanggaran delik korud tertentu 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sergketa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai bak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai bak milik publik/negara 4 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 	4.553.000.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/ Sub Kelembaran Laporan pematanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiyai DAK Bidang LI	Alokasi Anggaran (Rp)
22	Kalimantan Tengah	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan inventarisasi dan klarifikasi senketa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai baik milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai baik milik publik/negara 2 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiyai DAK Bidang LI 	3.133.926.000
23	Sulawesi Utara	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program IKOPER 2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 3 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melawan pencemaran yang menjadi prioritas nasional 4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 	3.771.158.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>2 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>C Peningkatan Kapasitas TSLA dan LII</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah pemukiman terhadap RKL / KPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen</p> <p>2 Laporan pemantauan dan klaimaksi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertutup)</p> <p>3 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LII</p>	
24	Centrala	<p>A Peningkatan Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas negara</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>2 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>C Peningkatan Kapasitas TSLA dan LII</p>	3.561.590.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
1		<p>Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah pesisiran terhadap RKL/RPL, pengawasan komisi penilai AMDAL, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>Laporan inventarisasi dan klifikasi pengujian kasus kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik kriminal tertentu)</p> <p>Laporan peningkatan kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LI</p>	
25	Sulawesi Tengah	<p>A. Tingkatkan Pencapaian Lingkungan</p> <p>1. Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2. Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>3. Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>3. Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1. Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p>2. Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>3. Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>4. Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>C. Peningkatan Kapasitas PSDA dan LI:</p>	4.779.863.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan penulisan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL/RPL, pengawasan komisi penilai bandal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup khususnya pelaksanaan delik Jural Terentu) 3 Laporan peningkatan Kapasitas SIM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 4 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LI 	4.209.340.000
26	Sulawesi Selatan	<p>A. Peningkatan Pemenuhan Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelabahan limbah B3, pengolahan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 3 Laporan pemenuhan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara <p>B. Peningkatan Kerusakan Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 2 Laporan kegiatan peyektivatan daur 3 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 4 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca <p>C. Peningkatan Kapasitas ISIA dan LII:</p>	4.209.340.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
1		Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /KPL, pengawasan komisi penilai Andel, dan evaluasi mutu dokumen)	
2		Laporan inventarisasi dan identifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formul tertentu)	
3		Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
4		Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah	
5		Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADW/AYATA	
27	Sulawesi Tenggara	<p data-bbox="698 661 722 934">A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p data-bbox="698 934 722 966">1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p data-bbox="698 966 722 997">2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p data-bbox="698 997 722 1029">B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p data-bbox="698 1029 722 1060">1 Laporan Desain Pengembangan Taman REHATI</p> <p data-bbox="698 1060 722 1092">2 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p data-bbox="698 1092 722 1123">3 Laporan pengembangan inkuarisasi gas rumah kaca</p> <p data-bbox="698 1123 722 1155">C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p data-bbox="698 1155 722 1186">1 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /KPL, pengawasan komisi penilai Andel, dan evaluasi mutu dokumen)</p>	4.200.562.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
28	Sulawesi Barat	<p data-bbox="383 863 410 1171">Indikator Kinerja/Sub Kegiatan</p> <p data-bbox="410 352 548 1444">2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dampak tindak pidana (delik formal maupun delik material) akibat peredaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p data-bbox="548 352 602 1444">3 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p data-bbox="602 352 656 1444">4 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang II)</p> <p data-bbox="656 352 709 1444">A Peningkatan Pencapaian Lingkungan :</p> <p data-bbox="709 352 763 1444">1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p data-bbox="763 352 816 1444">2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau luas basis negara</p> <p data-bbox="816 352 870 1444">B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p data-bbox="870 352 924 1444">1 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p data-bbox="924 352 977 1444">2 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p data-bbox="977 352 1031 1444">3 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p data-bbox="1031 352 1084 1444">4 Laporan pengembungan inventarisasi per rumah kaca</p> <p data-bbox="1084 352 1138 1444">C Peningkatan Kapasitas PSDA dan UIH:</p> <p data-bbox="1138 352 1192 1444">1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL / RPL, pengawasan komisi penilai Andal, dan evaluasi untuk dokumen)</p> <p data-bbox="1192 352 1245 1444">2 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan AUD/UYATA</p> <p data-bbox="1245 352 1299 1444">3 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p>	1.092.832.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		4 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAM Bidang LII	
29	Maluku	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan:</p> <p>1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>2 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan lain</p> <p>C Peningkatan Kapasitas (SIDA dan LII):</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah pemantauan terdapat RKL /RPL, pengawasan komisi pemilal Amdel, dan ceahasi mutu dokumen</p> <p>2 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAM Bidang LII</p>	2.571.255.000
30	Maluku Utara	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p>	2.049.830.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
31	Papua	<p>B. Pengendalian Kemiskinan Lingkungan :</p> <p>1. Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>2. Laporan pelaksanaan pengawasan kemiskinan lingkungan lain</p> <p>C. Peningkatan Kapasitas PSDA dan LIH :</p> <p>1. Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemerataan terhadap RKL / RPL, pengawasan komisi penilai Andal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2. Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiyai DAK Bidang LIH</p> <p>A. Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <p>1. Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>2. Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>B. Pengendalian Kemiskinan Lingkungan:</p> <p>1. Laporan hasil pengembangan taman KEMHY</p> <p>2. Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>3. Laporan pengembangan insentifisasi gas rumah kaca</p>	3.906.865.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
3.2	Papua Barat	<p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana idelik formal maupun delik material akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH <p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara 	4.917.880.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
3		Laporan pemanfaatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibayai DAK Bidang LI	
TOTAL			120.525.293.000

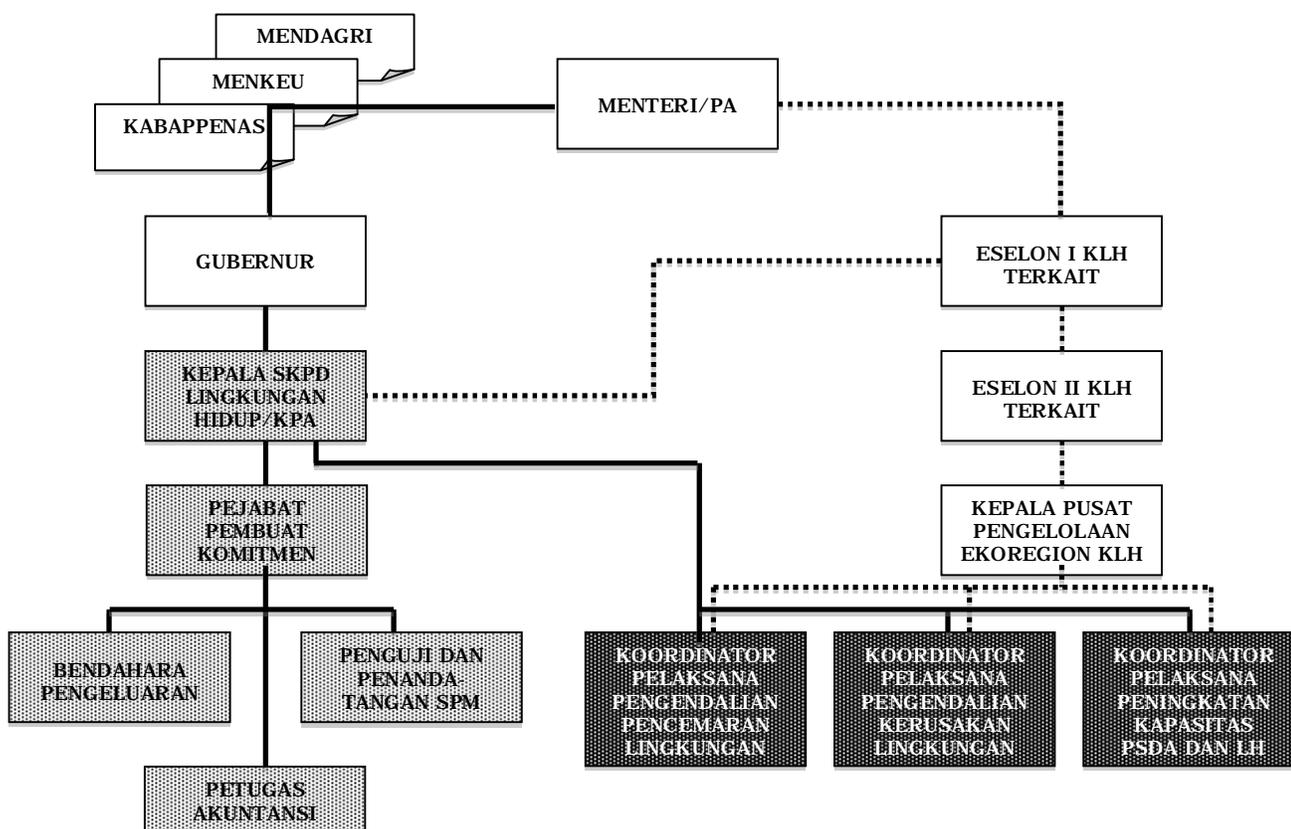
MENTERI NEGERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIC INDONESIA,

BALTIASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 08 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012

PENGGORGANISASIAN DAN ADMINISTRASI KEGIATAN

A. STRUKTUR PENGGORGANISASIAN PELAKSANAAN KEGIATAN



Keterangan :

- Garis pertanggungjawaban langsung dan merupakan alur pelaporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
- Garis koordinasi konsultatif dan merupakan alur pelaporan teknis kegiatan sebagaimana diatur dalam Lampiran IV peraturan ini
-  Ditetapkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan
-  Ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala SKPD Lingkungan Hidup

Struktur organisasi di atas dibentuk berdasarkan kepentingan pencapaian sasaran masing-masing keluaran dan kejelasan alur pertanggungjawaban pengambilan keputusan dan pelaporan dari segi teknis, manajerial, keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

1. Penjelasan tentang Pelaksana

a. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup harus memiliki kemampuan menjabarkan, mensinkronkan, mengharmonisasikan, dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Atas dasar hal tersebut, maka KPA yang ditunjuk sebaiknya adalah pejabat aktif setingkat eselon II pada instansi provinsi yang berwenang di bidang lingkungan hidup.

b. Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Petugas Akuntansi

Persyaratan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Penguji dan penandatanganan SPM, serta Petugas Akuntansi Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan penetapannya dilakukan oleh Gubernur. Seluruh pengelola keuangan yang tersebut diatas diharapkan tidak merangkap/melaksanakan tugas yang sama dalam pengelolaan keuangan Satuan Kerja selain Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup. Disarankan agar Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat eselon III yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang perencanaan dan/atau kesekretariatan.

c. Koordinator Pelaksana

Koordinator Pelaksana sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing keluaran ditetapkan oleh KPA. Pelaksana tersebut harus memiliki kemampuan menjabarkan, mensinkronkan, mengharmonisasikan, dan mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing keluaran dekonsentrasi bidang lingkungan hidup. Atas dasar hal tersebut, maka Koordinator yang ditunjuk sebaiknya adalah pejabat aktif setingkat eselon III yang memiliki lingkup tugas pokok dan fungsi :

- 1) berkaitan langsung dengan pengendalian pencemaran, pengawasan lingkungan atau pengendalian dampak lingkungan untuk Keluaran Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

- 2) berkaitan langsung dengan pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian dampak lingkungan atau konservasi/pengelolaan sumber daya alam untuk Keluaran Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3) berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas untuk Keluaran Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Seluruh koordinator pelaksana membentuk tim pelaksana yang anggotanya berasal dari instansi lingkungan hidup dan instansi lain yang dipandang perlu dengan kapasitas dan kepentingan sesuai kebutuhan. Jumlah anggota tim pelaksana ditentukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan cakupan lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan. Tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh KPA.

d. Pejabat Eselon I KLH terkait

Pejabat eselon I KLH terkait dalam hal ini adalah pembina utama dan penentu target kinerja SKPD di bidang teknis bagi masing-masing sub keluaran. Pejabat eselon I KLH yang dimaksud adalah :

- 1) Deputi Bidang Tata Lingkungan (Deputi I KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan di Kabupaten/Kota (pemantauan terhadap RKL-RPL, pengawasan Komisi Penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)
- 2) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Deputi II KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
 - b) Pemantauan Kualitas Udara di Wilayah Perkotaan yang Bersifat Strategis Nasional
 - c) Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai yang melewati Perkotaan yang menjadi Prioritas Nasional
- 3) Deputi Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perubahan Iklim (Deputi III KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Inventarisasi Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati
 - b) Disain Pengembangan Taman Kehati
 - c) Perubahan Tutupan Vegetasi dalam Rangka Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)
 - d) Kegiatan Penyelamatan Danau
 - e) Pelaksanaan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Laut
 - f) Pengembangan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
 - g) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- h) Inventarisasi Upaya Lokal dalam Menghadapi Perubahan Iklim untuk Mendukung Pelaksanaan PROKLIM
 - i) Identifikasi Aksi Mitigasi Inisiatif Lokal untuk Mendukung Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
- 4) Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah (Deputi IV) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
 - b) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*)
 - 5) Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan (Deputi V KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Inventarisasi dan Klarifikasi Pengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidup, khususnya Pelanggaran Delik Formil Tertentu
 - b) Inventarisasi dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang Berpotensi dan/atau telah Menimbulkan Kerugian bagi Masyarakat sebagai Hak Milik Privat dan/atau Lingkungan Hidup sebagai Hak Milik Publik/Negara
 - c) Inventarisasi dan Klarifikasi Dugaan Tindak Pidana (delik formil maupun delik materil) Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 6) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan (Deputi VI KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Adiwiyata.
 - 7) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan (Deputi VI KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Pemantauan Sungai Skala Nasional dan/atau Lintas Batas Negara
 - b) Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Rangka Optimalisasi Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah
 - 8) Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup.
- e. Pejabat Eselon II KLH terkait

Pejabat eselon II KLH terkait dalam hal ini adalah pendamping, pelaksana asistensi, serta sumber referensi SKPD di bidang teknis bagi masing-masing sub keluaran. Pejabat eselon II KLH yang dimaksud adalah:

- 1) Kepala Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapusarpedal) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran:
 - a) Pemantauan Sungai Skala Nasional dan/atau Lintas Batas Negara
 - b) Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Rangka Optimalisasi Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah
- 2) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri pada Sekretariat KLH (Karo PKLN) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai DAK Bidang LH
- 3) Asisten Deputi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Deputi I KLH (Asdep 4/I KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan di Kabupaten/Kota (pemantauan terhadap RKL-RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)
- 4) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana, dan Jasa pada Deputi II KLH (Asdep 1/II KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran:
 - a) Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
 - b) Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai yang melewati Perkotaan yang menjadi Prioritas Nasional
- 5) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi, dan Migas pada Deputi II KLH (Asdep 2/II KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
- 6) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil pada Deputi II KLH (Asdep 3/II KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
- 7) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak pada Deputi II KLH (Asdep 4/II KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pemantauan Kualitas Udara di Wilayah Perkotaan yang Bersifat Strategis Nasional
- 8) Asisten Deputi Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan pada Deputi III KLH (Asdep 1/III KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran:
 - 1) Inventarisasi Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati
 - 2) Disain Pengembangan Taman KEHATI

- 3) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 4) Perubahan Tutupan Vegetasi dalam Rangka Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)
- 9) Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat pada Deputi III KLH (Asdep 2/III KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Kegiatan Penyelamatan Danau
- 10) Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut pada Deputi III KLH (Asdep 3/III KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pelaksanaan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Laut
- 11) Asisten Deputi Mitigasi dan Perlindungan Fungsi Atmosfer pada Deputi III KLH (Asdep 4/III KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pengembangan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
- 12) Asisten Deputi Adaptasi Perubahan Iklim pada Deputi III KLH (Asdep 5/III KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran :
 - 1) Inventarisasi Upaya Lokal dalam Menghadapi Perubahan Iklim untuk Mendukung Pelaksanaan PROKLIM
 - 2) Identifikasi Aksi Mitigasi Inisiatif Lokal untuk mendukung Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
- 13) Asisten Deputi Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 pada Deputi IV KLH (Asdep 3/IV KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
- 14) Asisten Deputi Pengelolaan Sampah pada Deputi IV KLH (Asdep 4/IV KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*)
- 15) Asisten Deputi Pengaduan dan Penataan Hukum Administrasi Lingkungan pada Deputi V KLH (Asdep 1/V KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Inventarisasi dan Klarifikasi Pengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)
- 16) Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Deputi V KLH (Asdep 2/V KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Inventarisasi dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang Berpotensi dan/atau telah Menimbulkan Kerugian bagi Masyarakat sebagai Hak Milik Privat dan/atau Lingkungan Hidup sebagai Hak Milik Publik/Negara

- 17) Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Deputi V KLH (Asdep 3/V KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Inventarisasi dan Klarifikasi Dugaan Tindak Pidana (delik formil maupun delik materiil) Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 18) Asisten Deputi Penguatan Inisiatif Masyarakat pada Deputi VI KLH (Asdep 2/VI KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Adiwiyata

f. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion wilayah kerja terkait

Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion KLH (PPE KLH) adalah pejabat setingkat Eselon II KLH yang bertugas melaksanakan koordinasi perencanaan dekonsentrasi, mengkoordinir penyampaian laporan SKPD, dan penyelenggaraan kerjasama antar SKPD dalam wilayah kerjanya masing-masing. Kepala PPE KLH tersebut adalah :

- 1) Kepala PPE Sumatera yang mengkoordinir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka-Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung
- 2) Kepala PPE Jawa yang mengkoordinir Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur
- 3) Kepala PPE Kalimantan yang mengkoordinir Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah
- 4) Kepala PPE Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) yang mengkoordinir Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
- 5) Kepala PPE Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sumapapua) yang mengkoordinir Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat

2. Struktur dan Alur Pertanggungjawaban Manajerial dan Akuntabilitas

a. Perencanaan

Penganggaran dekonsentrasi wajib dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Lingkungan Hidup untuk ditetapkan sebagai Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) oleh Menteri Keuangan. RKA-KL yang telah ditetapkan tersebut wajib diserahkan Menteri selaku Pengguna Anggaran kepada Gubernur.

Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang mencakup Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Petugas Akuntansi untuk dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

KPA menetapkan Tim Pelaksana bagi masing-masing keluaran yang terdiri dari Koordinator dan anggotanya dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas. Koordinator Pelaksana wajib menyusun :

- 1) Perencanaan kas keluaran masing-masing berdasarkan RKA-KL untuk disampaikan kepada PPK;
- 2) Perencanaan kinerja berdasarkan target yang ditetapkan;
- 3) Pengelolaan sistem pelaporan agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

KPA mempersiapkan dan melaksanakan rencana dan organisasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Penyaluran Dana dan pengelolaan Barang Milik Negara hasil pelaksanaan Dekonsentrasi

Penyaluran dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara melalui Rekening Kas Umum Negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Barang-barang tersebut harus digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan ditatausahakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.

c. Pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial dan akuntabilitas

Laporan manajerial dan laporan akuntabilitas disusun sebagai satu kesatuan dan disampaikan per-triwulan serta akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Gubernur untuk disampaikan kepada Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang membidangi perencanaan nasional.

Laporan manajerial mencakup :

- 1) Perkembangan realisasi penyerapan dana
- 2) Pencapaian target keluaran

- 3) Kendala yang dihadapi
- 4) Saran tindak

Laporan keuangan mencakup :

- 1) Neraca Keuangan
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Format laporan-laporan diatas adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3. Struktur dan Alur Pertanggungjawaban Teknis Kegiatan

a. Acuan dan Perencanaan Kinerja

Kegiatan teknis dekonsentrasi yang dilaksanakan SKPD harus menggunakan dasar-dasar berikut :

- 1) Indikator dan Target Kinerja
- 2) Perencanaan untuk Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja yang harus diperhatikan adalah *Indikator Kinerja Kegiatan*, yaitu indikator pencapaian penyelenggaraan dekonsentrasi SKPD-SKPD provinsi yang ditetapkan oleh Menteri; dan *Indikator Kinerja Keluaran (Output)*, yaitu indikator pencapaian masing-masing Keluaran dari lingkup dekonsentrasi kepada SKPD-SKPD provinsi yang ditetapkan oleh Menteri.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- 1) Jumlah provinsi yang melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan
- 2) Jumlah provinsi yang melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan
- 3) Jumlah provinsi yang melaksanakan peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH

Ketiga indikator di atas memiliki target masing-masing 32 (tiga puluh dua) dengan satuan Provinsi. Oleh sebab itu, salah satu atau lebih provinsi tidak mampu melaksanakan mandat dekonsentrasinya akan menyebabkan keseluruhan target tidak tercapai.

Indikator Kinerja Keluaran (Output) adalah :

- 1) Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan tingkat provinsi
- 2) Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan tingkat provinsi
- 3) Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH tingkat provinsi

Ketiga indikator di atas memiliki target masing-masing berupa penjumlahan total dari jumlah *laporan teknis* per keluaran yang diamanahkan ke tiap-tiap provinsi. Oleh sebab itu, target kinerja keluaran ini harus dirinci kembali dalam struktur berikut :

- 1) Target Kinerja Keluaran keseluruhan adalah penjumlahan dari target kinerja keluaran masing-masing Provinsi dengan satuan ukur Laporan
- 2) Target Kinerja Keluaran Provinsi adalah penjumlahan dari target kinerja sub keluaran Provinsi dengan satuan ukur Laporan

Indikator dan Target Kinerja sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan dalam Lampiran II yang tak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Setiap KPA mewajibkan masing-masing Koordinator Pelaksana untuk menyusun Rencana Kinerja Pencapaian Target yang telah ditetapkan dan menggunakannya sebagai acuan dalam bekerja. Kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kinerja maupun Rencana Kas sangat mempengaruhi penilaian kinerja SKPD dan akan digunakan sebagai salah satu variabel dalam pengawasan dan evaluasi.

b. Mekanisme Koordinasi, Asistensi, dan Konsultasi

Keseluruhan pengorganisasian koordinasi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan dekonsentrasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masing-masing eselon I KLH wajib melaksanakan rapat koordinasi teknis/substansi nasional dalam rangka perencanaan dan/atau evaluasi maksimal 2 (dua) kali setahun yang dihadiri seluruh SKPD dalam rangka perencanaan dan evaluasi hasil kegiatan. Jumlah total rapat koordinasi nasional tersebut tidak boleh lebih dari 6 (enam) kali setahun untuk menjamin efisiensi pemanfaatan anggaran perjalanan dinas peserta. Hal ini mengimplikasikan penyelenggaraan yang bersifat terpadu antar eselon I KLH untuk meminimalkan jumlah pertemuan.
- 2) Seluruh eselon II yang terkait dengan sub keluaran yang didekonsentrasikan wajib melaksanakan bimbingan dan asistensi teknis terhadap SKPD yang dibiayai dari anggaran unitnya masing-masing. Bimbingan teknis yang diberikan harus memuat sekurang-kurangnya upaya :
 - a) Pemberian manual pelaksanaan dan manual pelaporan teknis
 - b) Asistensi dan pengarahan apabila dibutuhkan SKPD
 - c) Review/penilaian dan pemberian masukan atas hasil pelaksanaan
- 3) Seluruh kepala PPE yang wilayah kerjanya terkait wajib melaksanakan koordinasi pelaporan teknis dari SKPD untuk disampaikan kepada eselon II dan eselon I KLH terkait dan memfasilitasi kebutuhan kerjasama antar daerah dalam bentuk-bentuk diantaranya :

- a) Sinkronisasi jadwal, lokasi, dan metoda pelaksanaan
- b) Harmonisasi dan/atau integrasi pelaporan untuk mendapatkan informasi yang utuh
- c) Kerjasama formal yang dikuatkan dengan MoU antar Provinsi dalam bentuk penggabungan kontrak dengan pihak ketiga bersama, *joint service*, atau transfer tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundangan dan harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

4) Seluruh SKPD dapat melaksanakan kerjasama antar daerah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan dan menyelenggarakan penyampaian laporan teknis melalui PPE.

c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Teknis

Jenis-jenis laporan teknis sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IV dan bukan Laporan Manajerial maupun Laporan Akuntabilitas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini disampaikan dalam aturan sebagai berikut :

- 1) Koordinator Pelaksana menyampaikan laporannya kepada KPA dan Eselon II KLH terkait dengan tembusan kepada PPE.
- 2) Kumpulan laporan dari masing-masing Koordinator Pelaksana diintegrasikan dalam laporan terpadu oleh KPA untuk disampaikan kepada Gubernur dan Eselon I KLH terkait.
- 3) Gubernur menyampaikan laporan teknis Provinsinya sesuai yang telah dikompilasikan kepada Menteri.
- 4) Eselon I KLH menyampaikan kompilasi laporan teknis dari berbagai Provinsi sesuai bidang tugasnya kepada Menteri.

B. TATA LAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN

Administrasi dekonsentrasi mencakup pelaksanaan :

- 1. Administrasi pengadaan barang dan jasa.
- 2. Pengelolaan keuangan dana Dekonsentrasi, mencakup diantaranya:
 - a. Mempelajari teknis pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - c. Membuka rekening ke Bank Pemerintah;
 - d. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke kantor Pelayanan Pajak;
 - e. Menyiapkan Buku Kas Umum/Buku Kas Harian, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran;

- f. Menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK);
 - g. Menyiapkan Buku Uang Muka, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak;
 - h. Menyiapkan surat keputusan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran seperti Tim Teknis atau Kelompok Kerja;
 - i. Membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja, yang tugasnya dirangkap oleh para pengelola anggaran;
 - j. Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran per triwulan.
3. Penatausahaan barang milik negara yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan pemeliharaan/operasionalnya sebelum dihibahkan.
 4. Pelaporan manajerial dan akuntabilitas
 5. Penyediaan peralatan penunjang administrasi dekonsentrasi

Pelaksanaan seluruh kegiatan diatas mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan penyelenggaraannya dibiayai dari Dana Dekonsentrasi. Biaya yang ditimbulkan dalam administrasi kegiatan dibebankan pada Keluaran Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH dalam sub Keluaran Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH.

C. PENJELASAN BELANJA DEKONSENTRASI BIDANG LH

1. Batasan Barang yang Tidak Dapat Diadakan dengan Anggaran Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup

Dalam batang tubuh peraturan ini ditetapkan bahwa dana dekonsentrasi tidak dapat digunakan untuk: a) pembangunan gedung kantor dan fasilitasnya, b) pengadaan kendaraan dinas, c) perjalanan ke luar negeri, dan d) biaya rutinitas kantor yang dibiayai APBD.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, dana dekonsentrasi tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan aset tetap, sehingga dana dekonsentrasi juga tidak dapat digunakan untuk :

- a. membangun infrastruktur/prasarana lingkungan hidup (contoh: instalasi pengolahan air limbah terpadu, laboratorium lingkungan hidup)
- b. membangun fasilitas publik untuk lingkungan hidup (contoh: perpustakaan lingkungan hidup)
- c. membeli peralatan selain pendukung operasional kegiatan dan contoh demo/model.

2. Batasan Barang yang Dapat Diadakan dengan Anggaran Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup

Barang-barang yang dapat diadakan dengan anggaran dekonsentrasi meliputi :

- a. Perangkat pengolah data dan laporan (komputer berikut perlengkapannya dan perangkat lunak pengolah data) maksimal 2 buah per keluaran.
- b. Perangkat kerja lainnya, termasuk perangkat pengolah data khusus yang disyaratkan salah satu sub keluaran dalam petunjuk teknis.
- c. Contoh/model/prototipe/demo peralatan/kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam rangka pembinaan dan bagian dari metoda dan tahapan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Lampiran IV atau ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Eselon I KLH terkait.

Barang-barang di atas harus ditatausahakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 pasal 37A. Barang-barang tersebut wajib diserahkan kepada SKPD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang dengan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku.

3. Belanja Jasa Profesi, Jasa Lainnya, dan Kontraktual

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, dianjurkan untuk secara optimal memanfaatkan akun belanja jasa profesi, jasa lainnya, dan jasa kontraktual bagi :

- a. Tahapan dan/atau komponen kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus dan dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa profesional (contoh: jasa analisis sampel, survai lapangan, disain teknis, pembuatan produk/barang tertentu, dan lain-lain);
- b. Tahapan dan/atau komponen kegiatan yang membutuhkan banyak sumber daya manusia dan waktu dan dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa profesional (contoh: penyelenggaraan acara pertemuan, dan lain-lain);
- c. Tahapan dan/atau komponen kegiatan yang membutuhkan masukan pakar/narasumber ahli (contoh : pembuatan bahan materi pembinaan teknis, pelaksanaan sosialisasi, dan lain-lain).

4. Standar biaya dan Surat Tanda Pertanggungjawaban Mutlak

Standar biaya yang digunakan adalah Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011. Apabila terdapat satuan biaya yang tidak diatur dalam ketentuan tersebut, dapat dipergunakan standar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Satuan biaya yang tidak dapat mengacu SBU maupun HPS KLH dapat diajukan dengan perkiraan sendiri selama disertai alasan yang patut dan dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani KPA berikut data-data pendukung lainnya (contoh : bukti standar harga yang berlaku di pasar).

5. Struktur umum pembiayaan masing-masing keluaran

a. Administrasi Kegiatan

Anggaran administrasi kegiatan diletakkan dalam Keluaran Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH di bawah Sub Keluaran Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dengan DAK Bidang LH dengan rincian belanja sebagai berikut:

- 1) Biaya pengelolaan keuangan, mencakup:
 - a) Honorarium pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara, Pejabat SPM, dan Petugas-petugas Akuntansi)
 - b) Biaya proses pembukuan dan pelaporan keuangan, termasuk bahan dan ATK.
- 2) Biaya administrasi pengadaan barang dan jasa, mencakup:
 - a) Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
 - b) Honorarium pejabat pemeriksa/penerima barang dan jasa
 - c) Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa
 - d) Honorarium narasumber bila diperlukan
 - e) Biaya pengumuman penawaran pengadaan barang dan jasa
 - f) Biaya proses penilaian pengadaan barang dan jasa, termasuk bahan dan ATK
- 3) Biaya penatausahaan barang milik negara, mencakup :
 - a) Honorarium pelaksana pengelola barang milik negara
 - b) Biaya proses pengelolaan barang milik negara, termasuk bahan dan ATK
- 4) Biaya pelaporan
 - a) Biaya perjalanan untuk kehadiran dalam Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup Regional untuk perencanaan sebanyak 2 (dua) orang
 - b) Biaya perjalanan untuk kehadiran dalam Rapat Koordinasi Nasional untuk perencanaan sebanyak 2 (dua) orang
 - c) Biaya proses pengelolaan barang milik negara, termasuk bahan dan ATK
- 5) Peralatan penunjang berupa alat pengolah data siap pakai untuk pelaporan kegiatan maksimal 2 (dua) unit.

b. Struktur Pembiayaan Keluaran

Struktur pembiayaan masing-masing keluaran diluar biaya administrasi kegiatan sebagaimana diatur dalam huruf a, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Honorarium bulanan (orang-bulan/OB) pelaksana adalah berbasis Keluaran. Pelaksana tidak bisa menerima honorarium bulanan dari tiap-tiap sub keluaran.
- 2) Honorarium pelaksana sub keluaran adalah berbasis jumlah kegiatan yang dilaksanakan (orang-kali/OK). Pelaksana sub keluaran sebaiknya tidak merangkap di sub keluaran lainnya.
- 3) Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja dalam akun belanja modal.
- 4) Barang-barang penunjang yang dibutuhkan sub keluaran dialokasikan dalam Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dalam akun 521311.
- 5) Menganggarkan biaya untuk setiap sub output dan tahapan/komponen sesuai Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan.

D. FORMAT LAPORAN MANAJERIAL DAN AKUNTABILITAS

1. Laporan Manajerial disusun sesuai format dan dilaporkan berdasarkan tata laksana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
2. Laporan Akuntabilitas disusun sesuai format dan dilaporkan berdasarkan tata laksana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,**

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 08 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGAAN DEKONSENTRASI
 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah

Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya pelaksanaan lingkungan hidup di daerah

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah provinsi yang menyelenggarakan perencanaan lingkungan di daerah
2. Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan di daerah
3. Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah

KELUARAN (OUTPUT) PENCERAIAN LINGKUNGAN

Indikator Kinerja Keluaran

1. Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah D3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER
2. Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melwati perkotaan yang menjadi prioritas nasional
3. Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersilat strategis nasional
4. Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara
5. Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R

Sub-Output: Penguasaan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER

Hasil yang harus dihasilkan

- a. Kriteria yang memperlengkapi kondisi daerah
- b. Jumlah sertifikat yang diberikan kepada peserta pelatihan pelaksana PROPER
- c. Laporan pelaksanaan sosialisasi PROPER kepada asosiasi industri
- d. Laporan pelaksanaan inspeksi peserta kelengkapan dukungannya
- e. Laporan sementara peringkat PROPER
- f. Peringkat sementara PROPER
- g. Laporan penangan dan review sanggahan dan/atau klarifikasi perusahaan

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (kuartal)	Hasil yang diharapkan	Unit Eselon II yang bertanggung jawab
1 Persiapan	Penetapan kriteria PROPER Penguatan kapasitas	Ilonor pelaksana Peralatan Kunjungan bila perlu Narasumber Pertemuan Perjalanan Akomodasi peserta	Triwulan I dan II	Kriteria PROPER Jumlah sertifikat peserta Laporan sosialisasi	Asdep Pengendalian Pencemaran akibat Perubahan iklim, Energi dan Migas
2 Inspeksi	Pelaksanaan inspeksi	Perjalanan Sewa kendaraan Jasa analisa sampel	Triwulan II-III	Laporan inspeksi	Asdep Pengelolaan Limbah B3 dan Kermitihan Akibat Kontaminasi Limbah B3
3 Pasca inspeksi	Penyusunan rapor sementara	Pertemuan		Rapor sementara	

	Tetapan dan penampaian permampat sementara	Triwulan IV	Peningkat sementara
	Peningkatan dan review sanggahan/klarifikasi permasalahan		Laporan penanganan sanggahan/klarifikasi

Sub Output: Pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perlakuan yang menjadi prioritas nasional

Hasil yang harus dilaporkan

- a. Proposal pemantauan
- b. Laporan hasil pemantauan
- c. Laporan pelaksanaan asistensi kepada Kabupaten/kota

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen bekuja	Waktu pelaksanaan (kuartal)	Hasil yang diharapkan	Unit Eselon II pembina
1. Persiapan	Koordinasi	Ilonor pelaksanaan, Perizinan, Perijinan	Triwulan I-II	Proposal pemantauan	
2. Pemantauan	Pelaksanaan pemantauan	Perijinan, Sewa kendaraan, Jasa analisis sampel	Triwulan II-III	Laporan hasil pemantauan	Askep Pengendalian Pencemaran Akut, Manufaktur, Prasarana dan Jasa
3. Asistensi	Pelaksanaan asistensi teknis	Perizinan, Manasumber, Perijinan, Penggandaan/ pencetakan	Triwulan IV	Laporan asistensi	

Sub Output: Pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional

Hasil yang harus dilaporkan

- a. Laporan pelaksanaan persiapan pemantauan
- b. Data pemantauan
- c. Laporan hasil pemantauan
- d. Laporan pelaksanaan asistensi

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (kuartal)	Hasil yang dilaporkan	Unit Iscrom II pembina
1 Persiapan	Koordinasi perencanaan dan pra-survey Survey lokasi Penyiapan petugas pelaksanaan	Honor pelaksanaan pertemuan Terjadwal penunjang Materisumber Jasa pelugas Sewa kendaraan Perjalanan	Triwulan I	Laporan pelaksanaan	Asdep Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak
2 Pemantauan	Pemantauan road-side Analisis sampel BHM Pemantauan kinerja lalu lintas Uji pelik kendaraan bermotor	Perjalanan Sewa kendaraan Biaya petugas Jasa analisa sampel Biaya operasi alat Biaya sarana uji pelik	Triwulan II-III	Data pemantauan	

3	Komulasi data	Pelaksanaan komulasi data	Pertemuan Pengabdian/ pencetakan Bahan dan ATK Daya perugas	Laporan hasil pementarian
4	Evaluasi dan asistensi	Bimbingan teknis Kelaporan	Pertemuan Pengabdian/ pencetakan Bahan dan ATK Honor narasumber Pertemuan Kelaporan Akomodasi Bahan dan ATK Pengabdian/ pencetakan	Triwulan III Laporan pelaksanaan asistensi Triwulan IV

Sub Output: Pemantauan kualitas air sungai skala nasional dan/atau yang lintas batas negara

Hasil yang harus dicapai:

- a. Proposal pemantauan
- b. Laporan hasil pemantauan
- c. Data pemantauan
- d. Laporan pelaksanaan asistensi kepada Kabupaten/kota

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (kuartal)	Hasil yang dilaporkan	Unit/Iskelon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi	Timon pelaksana Perencanaan Perjalanan	Triwulan I	Proposal pemantauan	
2	Pemantauan	Pelaksanaan pemantauan	Perjalanan Sewa kendaraan Jasa analisa sampel	Triwulan II, III	Laporan hasil pemantauan Data pemantauan	Kepala Pusat Sarana Pengendalian Sampah Lingkungan
3	Asistensi	Pelaksanaan asistensi teknis	Perencanaan Narasumber Perjalanan Pengangkutan/ penelitian	Triwulan IV	Laporan asistensi	

Sub Output: Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah perkotaan melalui 3R

Hasil yang harus dilaporkan

- a. Laporan kerangka Kerja Pelaksanaan Penerapan 3R
- b. Laporan hasil pelaksanaan pilot project
- c. Panduan Model Pengelolaan Lingkungan Perkotaan melalui Penerapan 3R
- d. Laporan evaluasi

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belajar	Waktu pelaksanaan (Kuartal)	Hasil yang dilaporkan	Unit/akademik pembina
1. Persiapan	Inventarisasi dan survey koordinasi dengan stakeholders Perencanaan kerangka kerja	Trainer pelaksana Perencanaan Peralatan	Triwulan I	Laporan kerangka Kerja Pelaksanaan Penerapan BR	
2. Pelaksanaan	Hub. Project di 2 Kota Workshop/Seminar Transfer teknologi dan pengetahuan Penyusunan panduan	Performan Narasumber Penggandaan/pencetakan Perjalanan/Akomodasi Bahan dan ATK	Triwulan II-III	Laporan hasil pelaksanaan pilot project Panduan Model Pengelolaan Lingkup Penilaian melalui Penerapan BR	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah
3. Evaluasi dan pelaporan	Evaluasi dari pelaporan	Performan Penggandaan/pencetakan	Triwulan IV	Laporan evaluasi	

KELCARAN (OUTPUT) PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Indikator Kinerja Keluaran

1. Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI
2. Laporan disain pengembangan 'Taman KEHATI'
3. Laporan perubahan budaya warganya dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau (MIH)
4. Laporan kegiatan penyediaan dana
5. Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut
6. Laporan pengembangan inventarisasi data gas rumah kaca (GRK)
7. Laporan pengendalian ketekakan hutan dan lahan
8. Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM
9. Laporan identifikasi aksi mitigasi insidial lokal untuk mendukung penyusunan RAD

Sub Output : Inventarisasi data dan informasi KEHATI

Hasil yang harus dilaporkan

- a. Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI
- b. Laporan Profil KEHATI

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (kuartal)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II Pembina
1. Persiapan	Sosialisasi Identifikasi ketersediaan data dan informasi KEHATI Mem bangun jejaring data dan informasi Penyediaan sarana dan prasarana Verifikasi SDM di daerah	1. Honor pelaksanaan ATK dan bahan Pertemuan Pengadaan data	Triwulan I		Asdep Kelembagaan n Hewan dan Pengendalian Kerusakan Laut
2. Pelaksanaan	Mem bangun kesekretariatan Mem bangun nucleus data dan informasi KEHATI	Biaya pelipis Sewa kendaraan	Triwulan II-III	Laporan inventarisasi data	

	Workshop	Tinjauan Perkuliahan Akomodasi ATK dan bahan Perkuliahan	dan informasi KUHATI
3	Pelaporan	Penyusunan profil KUHATI daerah Penyusunan rencana induk Pengelolaan KUHATI daerah	Laporan Profil KUHATI
		Penggunaan/ pemecatan	Triwulan IV

Sub Output : Desain pengembangan Taman KUHATI

Hasil yang harus dikumpulkan

- a. Laporan identifikasi Taman KUHATI
- b. Laporan desain dasar taman KUHATI
- c. Database KUHATI
- d. Urut Rencana Aksi Pengelolaan Taman KUHATI

1	Persiapan	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
		Identifikasi lokasi Taman KUHATI	Identifikasi Lokasi Taman KUHATI	Honor pelaksanaan			
		Sajian Budaya dan Ekologi Calon Lokasi		Kontraktual		Laporan identifikasi Taman KUHATI	Asdep Kesekretariatan
		Identifikasi areal		Terjemuan	Kuartalan I		Triyan dan Pengendalian Kerusakan Lahan
		Identifikasi jenis tumbuhan lokal prioritas		Perjalanan/ Akomodasi			

2	Pelaksanaan	Sosialisasi jenis daerah dan rancangan delimitasi area Penciptaan jenis daerah dan delimitasi area Penyusunan desain dasar taman KELLATI Penciptaan desain	Narasumber Pengadaan data Pertemuan Kontak ATK dan Bahan	Kuartal II III Laporan desain dasar taman KELLATI
3	Pelaporan	Penyusunan Database: KELLATI Penyusunan Draft Rencana Aksi Pengelolaan Taman KELLATI	Pertemuan Narasumber Penganggaran/ pencetakan	Database KELLATI Draft Rencana Aksi Pengelolaan Taman KELLATI Kuartal III

Sub Output : Pembelian Tutupan Vegetasi Dalam Rangka Program Menuju Indonesia Hijau (MHI)

Hasil yang harus dilaporkan

- Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka MHI
- Profil perubahan tutupan vegetasi Provinsi

Komponen Kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (kuartal)	Hasil yang diharapkan	Umi Eselon II pembina
1 Persiapan	Koordinasi dan bimbingan teknis Penyajian data untuk acuan verifikasi lapangan	Honor pelaksanaan ATK dan bahan	Triwulan I		Asdep Kesnekragaman

		Perlemuan Pengadaan dan Kerasanumber Biaya perugas Sewa kendaraan	Data pemantauan Tutukan II-III	Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
2	Peleaksanaan	Survey perubahan tutupan vegetasi Survey pemantauan kabupatn nominator	Perjalanan Perencanaan Akomodasi ATK dan bahan Perencanaan	
3	Evaluasi dan pelaporan	Verifikasi hasil survey dan evaluasi Penyusunan laporan	Perencanaan IV	Laporan perubahan tutupan vegetasi

Sub Output : Kegiatan Penyelamatan Danau

Hasil yang harus dilaparkan Laporan kegiatan penyelamatan danau

Komponen kegiatan	Tabapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuamalah)	Hasil yang diharapkan
1	Persiapan Pengumpulan data dan informasi Koordinasi dengan stakeholders	1 kamar pelaksanaan ATK dan bahan Pertemuan	Triwulan I	Umil. Iseskon II perubina Asdep Kerusakan Ekosistem Perairan Laut

2	Pelaksanaan	Sosialisasi Lemahleuw Lima bingkai teknis kepada Ka/Kota Imigrasi pada pedanaan pengelolaan ekosistem dalam dan Permen 11 28/2009	Pengadaan dan Narasumber
		Biaya pelugas Sewa kendaraan Perjalanan Pertemuan Akomodasi ATK dan bahan	Triwulan II - III
3	Evaluasi dan pelaporan	Penyusunan laporan	Laporan kegiatan penyelenggaraan dalam
		Narasumber Pengadaan/ pencetakan	Triwulan IV

Sub Output : Pelaksanaan pengabdian kerusukan lingkungan laut

Hasil yang harus dilaporkan

Laporan pelaksanaan pengabdian kerusukan lingkungan laut

1	Komponen kegiatan Pensiapan	Tahapan pelaksanaan Pemilihan dan Penentuan Lokasi Pembentukan kelompok Sosialisasi	Komponen belajar Honor pelaksanaan ATK dan bahan Pertemuan Narasumber	Waktu pelaksanaan (Kumulatif) Triwulan I	Hasil yang dilaporkan	Uji Leskon II penultima Askep Pengabdian kerusukan
---	--------------------------------	---	---	--	-----------------------	--

3	Pelaksanaan	Pelaksanaan pembelian Pembelian tabir Gerakan penanaman bersama Pemeliharaan tanaman	Biaya perugas Pembelian tabir Pembelian alar Biaya Pemeliharaan	Tingkatan Pesisir dan Laut
4	Evaluasi dan pelaporan	Pantauan Ivaluasi dan pelaporan	Perjalanan Nausumber Perikanan Pengambilan/ penecebakan	Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut

Sub Output : Pengembangan inventarisasi data gas rumah kaca (GRK)

Hasil yang harus dilaporkan Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca

1	Komponen kegiatan Koordinasi	Tahapan pelaksanaan Pembentukan tim pelaksana Koordinasi kegiatan di daerah Koordinasi dgn KLH	Komponen belanja Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Nausumber	Unit Eselon II Pembina Hasil yang dilaporkan
				Unit Eselon II Pembina Askep Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer

2 Asistensi	Workshop dasar2 pelaksanaan inventarisasi emisi GRK di daerah Workshop identifikasi dan perhitungan polusi emisi GRK di daerah Workshop Analisis dan Pelaporan Emisi GRK di daerah	Pertemuan Karasumber Akomodasi Bahan dan ATK	Triwulan II - III
3 Pelaporan	Penyusunan laporan Penyempurnaan laporan	Penganggaran/ perencanaan Perizinan Biaya Pok	Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca Triwulan IV

Sub Output : pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Hasil yang harus dilaporkan

Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (kuartal)	Hasil yang dilaporkan	Unit/Isalab II pembina
1 Pembinaan dan Etnrek	Kemudahan dan pengolahan data hotspot Tembuatan peta rawan kebakaran hutan dan lahan	Tutor pelaksana ATK dan bahan	Triwulan I		Asdep Kecelakaan

	Pertemuan	Ilkayati dan Pengendalian Kerusakan Laban
	Evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat Prov dan Kab/Kota	
	Narasumber	
2 Sosialisasi	Pembuatan dan pendistribusian bahan sosialisasi Sosialisasi dan penyuluhan langsung di tingkat desa dan kecamatan yang rawan kebakaran hutan dan lahan	Triwulan II
	Perjalanan Balon dan ATK	
3 Peningkatan kapasitas Masyarakat Petani Api (MPA)	Identifikasi MPA Pembinaan dan Pendampingan Temberian insentif MPA dalam peubah penyesuaian dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan	Triwulan III
	Tenggandaan/ pencapaian	
4 <i>Grant/Check dan</i> investigasi serta pengawasan Unit usaha/kegiatan	Identifikasi lokasi usaha atau kegiatan	Laporan pengendalian kebakaran hutan diari laban
	Triwulan IV	

3	Isi/hasi dan pendampingannya KLLI	Evaluasi pencapaian awal pelaksanaan identifikasi	Pertemuan/ Akomodasi Narasumber Bahan dan ATK Perjalanan	Triwulan III	
4	pelaporan	Penyusunan laporan Penyampaian laporan	Pengambilan/ pencetakan Peremaman Akomodasi	Triwulan IV	Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM

Sub Output : Mendefikasi aksi mitigasi inisialif lokal untuk mendukung penyusunan RAD

Hasil yang harus dilaporkan

Laporan Mendefikasi aksi mitigasi inisialif lokal untuk mendukung penyusunan RAD

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Narasumber Perjalanan	Triwulan I		Asdep Adoprasi Perubahaan Iklim
	Tahapan pelaksanaan				
	Pembentukan Tim Inventarisasi				
	Pencentuan ruang lingkup inventarisasi				
	Pertaksanaan dan penentuan lokasi				
	Inventarisasi data sekunder				

2. Pelaksanaan	Analisa data sekunder Survey lapangan Penyusunan laporan survey	Pertemuan Narasumber Akomodasi Terdjalaran Konstruktual	Tiwukan II
3. Evaluasi dan pendampingan KLI	Evaluasi pencapaian awal pelaksanaan identifikasi	Pertemuan/ Akomodasi Narasumber Isahan dari NTK Pelayanan	Tiwukan III
4. Pelaporan	Penyusunan laporan Penyampaian laporan	Kegiatan/ pertemuan Pertemuan Akomodasi	Laporan identifikasi akal mingsai inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD Tiwukan IV

KELUARAN (OUTPUT) PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SDA DAN LII

Indikator Kinerja Keluaran

1. Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah Kabupaten/Kota (penunntaan terhadap KKL / MFL, pengawasan kumulasi perubal Andai, dan evaluasi mutu dokumen)
2. Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengakuan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)
3. Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai **leak milik** privat dan/atau lingkungan hidup sebagai **leak milik** publik/umara
4. Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik karum maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

5. Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ALIWIYATI
6. Laporan peningkatan kapasitas SLM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah
7. Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang III

Sub Curput : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah Kabupaten/Kota (pemantauan terhadap RKL/RPL, pengawasan komisi penilai Andal, dan evaluasi mutu dokumen)

Hasil yang harus dilaporkan

Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL/RPL, pengawasan komisi penilai Andal, dan evaluasi mutu dokumen)

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belajar	Waktu pelaksanaan (Narratif)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1. Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan RKL/RPL di daerah	<p>Persiapan</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Pasca pelaksanaan</p>	<p>Honor pelaksana</p> <p>ATK dan bahan</p> <p>Perumahan</p> <p>Perjalanan</p> <p>Honor narasumber</p> <p>Sewa kendaraan</p> <p>Pengiriman surat</p> <p>Pengandaan/ pencetakan</p>	<p>Terdulu I</p>		Asdip Kajian dampak lingkungan
2. Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Andal Daerah	<p>Persiapan</p> <p>Telaksanaan</p>	<p>Honor pelaksana</p> <p>ATK dan bahan</p>	<p>Terdulu II - III</p>		

<p>Pasca pelaksanaan</p>	<p>Terminan Perjalanan Donor narasumber Sewa kendaraan Pengiriman surat Penggunaan/penyetakan</p>	<p>Terminan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan di daerah</p>	<p>Laporan</p>
<p>3. Evaluasi Mula Dokumen AMBAL</p>	<p>Honor pelaksanaan ATK dan bahan Terminan Perjalanan Donor narasumber Sewa kendaraan Pengiriman surat Penggunaan/penyetakan</p>	<p>Triwulan IV</p>	<p>perubahan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di pemantauan terhadap KKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mini dokumen)</p>

Sub Output : Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formal tertentu)

Hasil yang harus dilaporkan
Laporan Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formal tertentu)

<p>1. Inventarisasi</p>	<p>Komponen kegiatan Tahapan pelaksanaan Pencatatan pengaduan</p>	<p>Komponen belanja Honor pelaksanaan</p>	<p>Waktu pelaksanaan (Kuartalan)</p>	<p>Hasil yang dilaporkan</p>	<p>Unit Diskrim II pembina</p>
-------------------------	---	---	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------------

	Klarifikasi Briefing pengasas	ATK dan bahan Perhitungan Perjalanan	Tujuan I	Aspek Pengaluan dan Penilaian Hukum Administrasi Lingkungan
2. Verifikasi	Penyajian Bahan Verifikasi Laporan Rekomendasi Evaluasi	Honor narasumber Pertemuan ATK dan bahan Analisa Lab Perjalanan Pengandaan/Perawatan	Tujuan II - III	
3. Pengkajian kapasitas	Sosialisasi	Pertemuan Narasumber Bahan/ATK Pengandaan/Perawatan	Tujuan IV	Laporan Inventarisasi dan klarifikasi pengandaan kasus lingkungan hidup khususnya pengelolaan dan pemertan

Sub Output : Inventarisasi dan klarifikasi segerakan lingkungan hidup yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara

Hasil yang harus dilaporkan

Laporan inventarisasi dan klarifikasi segerakan lingkungan hidup yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartal)	Hasil yang diperoleh	Unit Uselon II pembina
1. Persiapan	Koordinasi	Honor pelaksanaan ATK dan bahan Pertemuan Penggunaan	Triwulan I		Askep Teryeselesaian Sangat Lingkungan
2. Pelaksanaan	Inventarisasi Klaim/kegiatan Lapangan	Honor narasumber Pertemuan Sewa Kendaraan Analisa Lab Pelajaran Penggunaan	Triwulan II - III		
3. Pelaporan	Penyusunan Laporan	Pertemuan	Triwulan IV	Laporan inventarisasi dan klaim/kegiatan sertifikasi kegiatan hidup yang berpotensi sakit/ telah menimbulkan kegiatan bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/ atau kegiatan hidup sebagai hak milik publik/ negara	

Sub Output : inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formal maupun delik materiil) akibat perencanaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Hasil yang harus dilaporkan

Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formal maupun delik materiil) akibat perencanaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belajar	Waktu pelaksanaan (kuantitatif)	Hasil yang diharapkan	
1. Inventarisasi	Koordinasi Kekapitulasi dugaan kasus	Hunar pelaksanaan ATK dan bahan Pertemuan Penggandaan	Triwulan I		Unit Eselon II pembina Asdep Pengkajian Hukum Pidana Lingkungan
2. Klarifikasi	Klarifikasi	Honor narasumber Pertemuan Sierra Kendaraan Analisa Lab Tejakanan Penggandaan	Triwulan II - III		
3. Pelaporan	Penyusunan laporan	Pertemuan Penggandaan/ penyalakan	Triwulan IV	Laporan inventarisasi dan klarifikasi dengan tindak pidana (delik formal maupun delik materiil) akibat perencanaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	

Sub Output : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADWIYATA

Hasil yang harus dilaporkan
Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADWIYATA

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (kuartal)	Hasil yang diharapkan	Unit Eselon II Pembina
1. Persiapan	Tahapan pelaksanaan koordinasi dengan Kab/Kota	Honor pelaksanaan ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber	Triwulan I		Asisten Pengaman Insiatif Masyarakat
2. Pelaksanaan	Sosialisasi Program ke Kab/Kota Pembinaan teknis ke Kab/Kota dalam rangka pembinaan sekolah Membuat pilot project untuk 4 satuan sekolah yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) Memulai dan menetapkan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi	Honor narasumber Pertemuan Perjalanan ATK dan Bahan Penggunaan/ pencetakan	Triwulan II - III		
3. Evaluasi dan pelaporan	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepalari ke	Pertemuan Narasumber	Triwulan IV	Laporan pembinaan dan	

	tingkat Pusat	Tenggandaan/ pencetakan	pengawasan pelaksanaan ADWIV/ATA
Sub Output: Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah			
Hasil yang harus dilaporkan			
Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah			
Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)
1. Persiapan	Klasifikasi/pemeriksaan kompetensi laboratorium pemerintah DAKE LH	Honor pelaksanaan ATK dan bahan Tertentu	Triwulan I
2. Pelaksanaan	Penyusunan materi Penerapan peserta/penyaji/mausum ber dan instruksi Bimtek Pemanfaatan Laboratorium DAKE LH	Vertemua Honor pengajar/ mausumber dan instruksi ATK dan bahan Tenggandaan	Triwulan II - III
3. Pelaporan	Penyusunan laporan	Vertemua ATK dan bahan	Triwulan IV
			Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka
			Unit, Disdik II Pembina Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusatpetah)

			Tenggadaan/ Pencetakan	Optimalisasi laboratorium Inkubasi dan diacrah
--	--	--	---------------------------	---

Sub Output: Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LII

Hasil yang harus dilaporkan

Laporan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LII

Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (kuartal)	Instansi yang diporkan	Unit Eselon II pembina
1. Persiapan	Tahapan pelaksanaan pemantauan Koordinasi dengan daerah Kab/Kota penerima DAK LII	Honor pelaksanaan ATK dan biaya Perlengkapan Perjalanan Honor narasumber	Triwulan I		Kepala Biro Pemantauan dan Kejasama Luar Negeri
2. Pelaksanaan	Pemantauan lapangan kumpul data hasil pemantauan	Sewa kendaraan Lang harian Penginapan Perakunan	Triwulan II - III		
3. Evaluasi dan pelaporan	Temuan evaluasi dengan M.H Perurusan laporan	Peremuan Narasumber ATK dan biaya Perjalanan	Triwulan IV	Laporan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang	

	Terwujudnya/ penerbitan	dibiayai DAK Bidang I/II
--	-------------------------	--------------------------

PELAKSANA KEGIATAN

Laporan teknis harus memuat: a) Kumpulan data dan informasi yang wajib dikumpulkan; b) hasil analisis terhadap data dan informasi tersebut, serta informasi dari seluruh rangkaian proses pelaksanaannya. Rincian lebih lanjut ditetapkan oleh Eselon I/KLJ terkait

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN TERBUKA
REPUBLIK INDONESIA,

BALETTIASAR KAMBUAYA